

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976).

Tujuan dari teori agensi adalah *pertama*, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*). *Kedua* untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*). Secara garis besar teori agensi dikelompokkan menjadi dua (Eisenhardt, 1989), yaitu *positive agency research* dan *principal agent research*. *Positive agent research* memfokuskan pada identifikasi situasi dimana agen dan prinsipal mempunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme pengendalian yang terbatas hanya menjaga perilaku *self-serving* agen. Sementara itu *principal agent research* memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya, secara garis besar penekanan pada hubungan *principal* dan *agent*.

*Principal-Agent Research* mengungkapkan bahwa hubungan *agent-principal* dapat diaplikasikan secara lebih luas, misalnya untuk menggambarkan hubungan pekerja dan pemberi kerja, *auditor* dengan *auditee*. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Posisi, fungsi, situasi, tujuan, kepentingan dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang tersebut akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh antara satu sama lain.

*Shareholder* atau prinsipal mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas termasuk pengambilan keputusan ekonomik, dalam lingkungan yang tidak pasti seperti perusahaan dalam kondisi *financial distress*. Agen sebagai seorang manajer akan mengambil keputusan untuk melakukan berbagai strategi guna mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Disisi lain agen merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh prinsipal berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya.

Eisenhardt (1989) dalam Astria (2011) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan

kepentingan pribadinya. Manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan pengungkapan informasi melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal karena dengan kondisi yang paling besar ketidakpastiannya, misalnya kurang dalam penguasaan informasi dalam sebuah perusahaan.

Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi dapat menjadi pemicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Adanya asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat membuka peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan *earnings management* dalam rangka mengelabui pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Dalam hal ini apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik saham, maka manajer akan cenderung melakukan kecurang dengan melakukan praktik manajemen laba untuk meningkatkan keuntungannya sendiri. Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*.

Menurut Sutedi (2006,175), *Corporate Governance* dapat di definisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Suatu tata hubungan antara para *stakeholders* yang digunakan untuk menentukan dan mengendalikan arah strategi dan kinerja perusahaan. *Corporate governance* juga diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan.

Penerapan *corporate governance* dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*). *Good corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang saham (Susiana dan Herawaty, 2007). Selain digunakannya *corporate governance* dalam meminimalkan konflik, keadaan tersebut juga membutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator diantara agen dan principal. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku agen apakah sudah bertindak sesuai dengan keinginan *principal*. Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak *principal* dengan pihak agen dalam mengelola keuangan perusahaan. Auditor melakukan fungsi monitoring pekerjaan agen melalui suatu sarana yaitu laporan keuangan.

### 2.1.2. Struktur *Corporate Governance* (Komite Audit)

Dalam struktur *corporate governance* terdapat Komite Audit yang bekerjasama dengan Dewan Komisaris untuk mengawasi jalannya perusahaan. Menurut Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) (2002) dalam Jama'an (2008:14), Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan. Tugas utama Komite Audit adalah mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Komite Audit terdiri dari dua anggota yang merupakan pihak independen (pihak dari luar Perseroan) yang berkemampuan di bidang akuntansi dan keuangan dan diketuai oleh Komisaris Independen.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit sebagai pendukung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerjasama dengan pihak yang melaksanakan fungsi Internal Audit. Komite Audit beranggota 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota independen. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi,

keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku.

### 2.1.3. Struktur *Corporate Governance* (Dewan Direksi)

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yaitu UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih sebagai atau dipilih untuk mewakili para pemegang saham untuk membangun aturan yang terkait dengan manajemen perusahaan dan membuat keputusan-keputusan penting perlahan (Wikipedia, 2007). Dewan Direksi memiliki Tugas:

1. Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan,
2. Mewakili perseroan, baik di luar pengadilan (perjanjian, kesepakatan, dll.) maupun di dalam pengadilan. Tidak ada pihak lain yang dapat bertindak atas nama perseroan kecuali diberikan kuasa oleh direksi yang berwenang;
3. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-

peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perseroan;

4. Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan;
5. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan transparan, jika diperlukan direksi membutuhkan persetujuan komisaris atau RUPS dalam setiap pengambilan keputusannya. Untuk itu, direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko secara terstruktur dan komprehensif;
6. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

#### 2.1.4. Kualitas Audit (Kompetensi)

Menurut De Angelo (Kusharyanti, 2002: 43) kualitas audit didefinisikan sebagai kemungkinan (*joint probability*) bahwa auditor akan menemukan pelanggaran yang terjadi dalam system akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Menurut De Angelo (1981) dalam Astria (2011) menyatakan bahwa yang ia maksud dengan kualitas audit adalah bahwa:

1. Kualitas ditentukan oleh kompetensi dan independensi auditor. Auditor yang kompeten adalah auditor yang bisa menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "bersedia" melaporkan" pelanggaran tersebut.

2. Kualitas ditentukan dari sisi suplai audit saja, yaitu dari sisi auditor, tidak dari sisi permintaan, yaitu klien.
3. Kualitas audit ditentukan oleh penilaian pasar.

Kualitas audit sendiri, menurut *AAA Financial Committee* (Christiawan; 2002:36) ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi auditor. Menurut Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004:23) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Sejalan dengan pendapat Trotter, selanjutnya Bedard (1986) dalam Sri Lastanti (2005:88) mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Adapun Kusharyanti (2003:3) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri klien. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Kantor Akuntan Publik sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat harus memilih auditor yang berkompeten dalam bidangnya. Auditor yang berkompeten memiliki pengalaman yang cukup, profesional dan ahli dibidangnya.

Kualitas Akuntan Publik merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big four*, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai

tenaga profesional diatas 25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *Big four*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang. KAP yang besar lebih independen dan cenderung memiliki auditor yang berkompeten dibandingkan dengan KAP yang kecil. Dengan alasan bahwa ketika KAP besar kehilangan satu klien, tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatannya. Akan tetapi, jika KAP kecil kehilangan satu klien akan sangat berarti karena kliennya sedikit (Shockley, 1981) dalam Hardiningsih (2010).

#### **2.1.5. Kualitas Audit (Independensi)**

Menurut Sri (2007) Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan. Demikian pula, kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan publik itu sendiri.

Kurangnya independensi auditor dan maraknya manipulasi akuntansi korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan mulai menurun, sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditor mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen.

Independensi akuntan publik dapat terpengaruh jika akuntan publik mempunyai kepentingan keuangan atau mempunyai hubungan usaha dengan klien yang diaudit. Independensi auditor dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Ikatan keuangan dan usaha dengan klien
2. Jasa-jasa lain selain jasa audit yang diberikan klien
3. Lamanya hubungan kantor akuntan publik dengan klien

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi independensi tersebut di atas bahwa independensi dapat dipengaruhi oleh ikatan keuangan dan usaha dengan klien, jasa-jasa lain yang diberikan auditor selain audit, persaingan antar KAP dan ukuran KAP. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyono dalam Hardiningsih (2010) menghasilkan temuan yang beragam diantaranya bahwa penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan publik kehilangan independensinya, karena akuntan publik tersebut merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit.

#### **2.1.6. Internal Audit**

Menurut Aryani (2011) terjadi perkembangan dalam peran *internal audit* yaitu dari sekedar unit yang mengecek kepatuhan, menjadi sebuah fungsi yang berperan aktif sebagai mitra bagi manajemen dalam mendukung penerapan GCG.

Menurut Daniri, internal audit merupakan bagian dari praktik *Good corporate governance* (GCG), juga praktik manajemen, dimana didalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam

proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan.

Internal Audit merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna memberikan suatu pendapat. Internal audit merupakan fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang telah dijalankan (Tugiman, 2006). Gay dan Simnett dalam Aryani (2011) menyatakan fungsi internal audit yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan dan membantu menghasilkan informasi akuntansi yang handal untuk pembuatan keputusan. Pihak yang melaksanakan auditing disebut dengan auditor. Pengertian auditing semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan yang meningkat akan hasil pelaksanaan auditing.

Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Sedangkan untuk fungsi audit internal yaitu melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, dengan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

#### **2.1.7. Integritas Laporan Keuangan**

Hardiningsih (2010) integritas adalah jujur dan apa adanya. Laporan keuangan yang memiliki integritas adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau

disembuyikan. Integritas laporan keuangan adalah kualitas informasi yang menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan bias serta secara jujur menyajikan apa yang dimaksudkan untuk dinyatakan. Sedangkan menurut *Internasional Financial Reporting Standart (IFRS)* dalam IAS No.01 kualitas informasi yang menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan secara jujur menyajikan apa yang dimaksudkan untuk dinyatakan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, lembaga-lembaga dan masyarakat. Pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda-beda.

Dalam *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC)* No.2 mengenai *Qualitative Characteristic Of Accounting Information*, terdapat dua hal yang menjadi kualitas primer dalam suatu laporan keuangan, yaitu relevansi (*relevance*) dan keandalan (*reliability*) menurut Kieso dan Weygandt dalam Astria (2011). Laporan keuangan yang memiliki integritas yang tinggi maka harus

memenuhi dua karakteristik utama dalam suatu laporan keuangan. Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang tinggi dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut, sehingga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh dari struktur *corporate governance*, kualitas audit, independensi dan internal audit terhadap integritas laporan keuangan, diantaranya adalah:

Tabel 2.1  
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Variabel dan Metodologi	Hasil
1	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit dan Leverage terhadap Integritas Laporan Keuangan (Kemal Rizky Habibie UIN SYARIF HIDAYATULLAH 2017)	Variabel Independen : Komite Audit, Kualitas Audit dan Leverage  Variabel Dependen : Integritas Laporan Keuangan  Metodologi : Penelitian data sekunder dengan analisis regresi berganda	Komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan dan Kualitas audit juga tidak berpengaruh terhadap integritas laporan Sedangkan Leverage berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan
2	Pengaruh Independensi Auditor, Komisar Independen, Dan Kualitas Audit	Variabel Independen : Independensi Auditor, Komisar Independen, dan Kualitas Audit  Variabel Dependen :	Independensi Auditor dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan

	terhadap Integritas Laporan Keuangan ( Dessy Aprillia UNIVERSITAS RAJA MARITIM 2017)	Integritas Laporan Keuangan  Metodologi : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif	Sedangkan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan
3	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Pergantian Auditor, dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Nelly Yulinda UNIVERSITAS NEGERI RIAU 2016)	Variabel Independen : Komisaris independen, komite audit, leverage, pergantian auditor, dan spesialisasi industri auditor  Variabel Dependen : Integritas Laporan Keuangan  Metodologi : Penelitian data sekunder dengan analisis regresi berganda	Komisaris independen, komite audit, leverage, pergantian auditor, berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
4	Pengaruh struktur kepemilikan, komite audit, komisaris independen, dan dewan direksi terhadap integritas laporan keuangan (N.P.Yani Wulandari UNIVERSITAS UDAYANA 2014)	Variabel Independen : Pengaruh struktur kepemilikan, komite audit, komisaris independen, dan dewan direksi  Variabel Dependen : Integritas Laporan Keuangan  Metodologi : Penelitian data sekunder dengan analisis regresi berganda	Komite audit dan komisaris sebagai variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan dewan direksi, memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
5	Pengaruh struktur corporate governance (Komisaris independen, Kepemilikan managerial,	Variabel Independen : Komisaris independen, Kepemilikan managerial, Kepemilikan institusional, Komite audit, audit tenure, dan spesialisasi industri	Struktur <i>corporate governance</i> proporsi komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan

	<p>Kepemilikan institusional, Komite audit) audit tenure, dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan (Ocktavia Nicolin UNIVERSITAS DIPONEGORO 2013)</p>	<p>auditor</p> <p>Variabel Dependen : Integritas Laporan Keuangan</p> <p>Metodologi : Penelitian data sekunder dengan analisis regresi berganda</p>	<p>keuangan. Sedangkan Struktur <i>corporate governance</i> kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Kemudian untuk <i>Audit tenure</i> dan Spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan.</p>
6	<p>Pengaruh independensi, mekanisme corporate governance (komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit) kualitas audit dan manajemen laba terhadap integritas laporan keuangan (Daniel Salfauz Tawakal Putra UNIVERSITAS DIPONEGORO 2012)</p>	<p>Variabel Independen : Independensi, mekanisme corporate governance (komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit) kualitas audit dan manajemen laba</p> <p>Variabel Dependen : Integritas Laporan Keuangan</p> <p>Metodologi : Penelitian data sekunder dengan analisis regresi berganda</p>	<p>Independensi, komite audit, kualitas audit, manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional menunjukkan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.</p>

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh struktur *corporate governance*, kualitas audit, independensi, dan internal audit terhadap integritas laporan keuangan. Untuk memahami bagaimana keempat hal ini dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan maka akan digunakan teori agensi sebagai landasan pemikiran dalam penelitian ini. Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi menjelaskan adanya hubungan keagenan atau kontrak kerja yang melibatkan antara dua pihak. Teori keagenan (*agency theory*) ini menjelaskan hubungan keagenan antara dua pihak dimana satu pihak tertentu (*principal*) mempekerjakan pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan digunakan untuk menyelesaikan dua permasalahan (Eisenhardt, 1989) yaitu pertama, masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Kedua, adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda yang dikarenakan adanya perbedaan preferensi terhadap risiko.

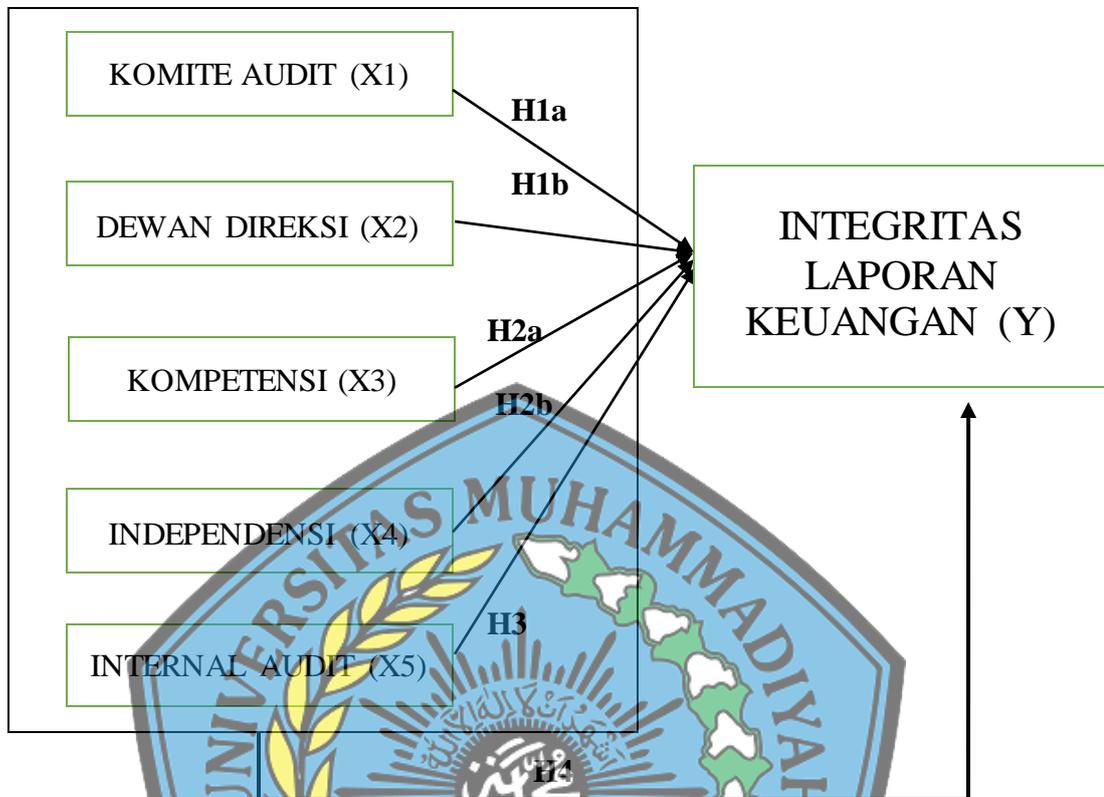
Potensi masalah yang muncul dalam teori agensi yaitu adanya asimetri informasi. Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya

keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik tersebut dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*. Hal ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada *shareholders* bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan kepada perusahaan.

Selain menggunakan mekanisme *corporate governance* dalam meminimalkan konflik, perusahaan juga membutuhkan pihak lain yang bersifat independen sebagai mediator antara prinsipal dan agen. Pihak ketiga ini berguna untuk mengawasi perilaku agen apakah telah bertindak sesuai dengan keinginan principal dan juga memberikan informasi yang andal dan bermanfaat bagi *principal* yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani kepentingan principal dengan agen dalam mengelola perusahaan.



### Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

### Kerangka Pemikiran

#### 2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran teoritis mengenai pengaruh struktur *corporate governance*, kualitas audit, dan internal audit terhadap integritas laporan keuangan, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

##### 2.4.1. Pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan keagenan adalah hubungan kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) yang memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberi wewenang kepada

agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Untuk menciptakan keputusan yang terbaik bagi principal dan mengurangi resiko adanya asimetri informasi, maka akan penting adanya pengawas yang independen di dalam suatu perusahaan. Berdasarkan surat keputusan BAPEPAM, setiap perusahaan yang telah *go public* wajib memiliki komite audit. Dalam hal pelaporan keuangan, komite audit bertugas memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijakan keuangan yang berlaku telah terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah telah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern (Hardiningsih, 2010). Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholder* dan pengungkapan semua informasi yang dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan. Berdasarkan tugas dari komite audit sebagai pengawas independen atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen, maka peranan komite audit akan mampu meningkatkan integritas laporan keuangan. Pengaruh signifikan dari komite audit terhadap integritas laporan keuangan terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Astria (2011), Oktadella (2011) serta penelitian Gayatri dan Suputra (2013) yang dinyatakan dengan adanya hubungan positif. Dengan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1a = Terdapat pengaruh positif dari komite audit terhadap integritas laporan keuangan.**

#### **2.4.2. Pengaruh dewan direksi terhadap integritas laporan keuangan**

Dalam rangka untuk pencapaian *good corporate governance* (GCG), keberadaan dewan direksi diharapkan mampu menyeimbangkan proses pengambilan keputusan terutama dalam integritas informasi dalam laporan keuangan. Dewan direksi bekerjasama dengan Komisaris independen memiliki peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yaitu untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan serta perlindungan terhadap pihak investor dalam jangka pendek ataupun jangka panjang (Aji, 2012). Dewan direksi memiliki peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yaitu untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan serta perlindungan terhadap pihak investor dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Yermarck (1996) memperoleh hasil bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sehingga secara umum tidak berpengaruh juga terhadap integritas laporan keuangan. Dengan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1b = Terdapat pengaruh positif dari dewan direksi terhadap integritas laporan keuangan.**

#### **2.4.3. Pengaruh kompetensi terhadap integritas laporan keuangan**

Menurut Bedard (1986) dalam Sri Lastanti (2005:88) mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Dalam

melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Kantor Akuntan Publik sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat harus memilih auditor yang berkompeten dalam bidangnya. Auditor yang berkompeten memiliki pengalaman yang cukup, profesional dan ahli dibidangnya.

Penelitian-penelitian sebelumnya membedakan kualitas audit berdasarkan perbedaan *big five* dan *non big five* dan ada juga yang menggunakan spesialisasi industri auditor untuk memberi nilai bagi kualitas audit ini seperti penelitian (Mayangsari, 2003). Dalam suatu argumen yang diungkapkan oleh Teoh (1993), bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan kualitas *earnings*, yang diukur dengan *Earnings Response Coefficient (ERC)*. Penelitian kali ini menilai kompetensi auditor berdasarkan pengelompokan auditor *big four* dengan *non big four*, dikarenakan salah satu KAP *big five* yaitu Arthur Andersen telah dinyatakan *collapsed*. Teori reputasi memprediksikan adanya hubungan positif antara ukuran KAP dengan kualitas audit (Lennox, 1999). Kompetensi Penelitian DeAngelo (1981) yang dikutip dari penelitian Lennox (1999) mengemukakan bahwa KAP yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil. Dengan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

***H2a = Terdapat pengaruh positif dari kompetensi terhadap integritas laporan keuangan.***

#### 2.4.4. Pengaruh independensi terhadap integritas laporan keuangan

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Knapp (1991) menunjukkan bahwa lamanya hubungan antara *auditee* dengan auditor dapat mengganggu independensi serta keakuratan auditor untuk menjalankan tugas pengauditan. Dalam hubungan auditor-klien terdapat tendensi bahwa seiring dengan perjalanan waktu, auditor secara berangsur menyesuaikan dengan berbagai keinginan manajemen dan kemudian tidak bertindak sepenuhnya independen. Mautz dan Sharaf (1961) dalam Myers (2003) menyatakan bahwa semakin lamanya hubungan relasi antara KAP-klien dapat mempunyai pengaruh yang merugikan pada independensi KAP karena obyektifitas KAP pada klien akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Dugaan rusaknya independensi auditor disebabkan karena masa kerja auditor dan klien menyebabkan pada beberapa negara, termasuk Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan rotasi yang sifatnya *mandatory* (Astria, 2011). Dengan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

***H2b : Terdapat pengaruh positif dari independensi seorang auditor terhadap integritas laporan keuangan.***

#### 2.4.5. Pengaruh internal audit terhadap integritas laporan keuangan

Faktor paling sederhana bagi eksternal auditor untuk menguji laporan keuangan adalah dengan melihat adanya keberadaan fungsi internal audit dalam perusahaan. SAS No 65 mengindikasikan bahwa fungsi internal audit harus

mempunyai kualitas dan kompetensi yang mencukupi agar auditor eksternal dapat mempertimbangkan kinerja audit internal untuk digunakan sebagai bukti yang kompeten bagi audit laporan keuangan. Internal Audit merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna memberikan suatu pendapat. Internal audit merupakan fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang telah dijalankan (Tugiman, 2006). Gay dan Simnett dalam Aryani (2011) menyatakan fungsi *internal audit* yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan dan membantu menghasilkan informasi akuntansi yang handal untuk pembuatan keputusan. Dengan penerapan fungsi internal audit yang baik, dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang semakin baik pula dan dapat mengurangi permasalahan keagenan yang akan muncul antara prinsipal dan agen. Dengan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

***H3 = Terdapat pengaruh positif dari internal audit terhadap integritas laporan keuangan.***

#### **2.4.6. Pengaruh komite audit, dewan direksi, kompetensi, independensi dan internal audit terhadap integritas laporan keuangan**

Komite audit, dewan direksi, kompetensi, independensi dan internal audit merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra (2012) mengatakan bahwa komite audit dan kompetensi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014) mengatakan bahwa

dewan direksi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dengan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

***H4 = Terdapat pengaruh positif dari komite audit, dewan direksi, internal audit, independensi dan kompetensi terhadap integritas laporan keuangan.***

